



PEMERINTAH PROVINSI BALI



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI**

Jl. Kapten Tantular No.1 Niti Mandala, Web : <http://kesbangpol.baliprov.go.id/>
Telp. (0361)255193 Fax (0361) 231788 Denpasar 80235

KATA PENGANTAR

“OM SWASTIASTU”

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali berhasil menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan rumusan keinginan untuk mewujudkan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) juga merupakan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk menggambarkan tahapan – tahapan perencanaan dari program dan kegiatan di Tahun 2023, dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini juga dapat memberikan gambaran target – target yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Tahun 2023, yang mana target – target tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja yang telah di tetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini kami susun, semoga dapat digunakan dengan baik sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan beberapa tahun kedepan.

“OM SHANTI, SHANTI, SHANTI, OM”

Bali, 7 Agustus 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA BADAN
	I Gusti Ngurah Wiryanata NIP. 19661231 199303 1 208

Daftar Isi

Daftar Isi.....i

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Dokumen RENJA..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 37

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 53

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 55

2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat 61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 64

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 64

3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah 65

3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 66

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 69

BAB V PENUTUP..... 70

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali

- Penanggung Jawab

:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
- Ketua

:

Sekretaris Badan
- Sekretaris

:

Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota

:

1.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Daerah;

2.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri;

3.

Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

4.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

5.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

6.

Sub Koordinator Unit Substansi Keuangan;

7.

Sub Koordinator Unit Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

8.

Sub Koordinator Unit Substansi Penanganan Konflik;

9.

Sub Koordinator Unit Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

10.

Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik;

11.

Sub Koordinator Unit Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

12.

Sub Koordinator Unit Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa;

13.

Sub Koordinator Unit Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;

14.

Sub Koordinator Unit Substansi Organisasi Kemasyarakatan;

15.

Perencana Ahli Pertama;

16.

Pranata Komputer Ahli Pertama.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali disusun berdasarkan RENSTRA sebagai terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali. Sebagai dokumen tahunan, RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RENJA merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari Visi, Misi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA ke dalam program dan kegiatan. Disamping itu RENJA juga memuat arahan operasional dan acuan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada tahun 2023 meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali didasarkan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).
- 17) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
- 18) Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.
- 19) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Renja Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2023 adalah menjabarkan Rencana Strategis Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2023 serta sebagai bahan

masuk pada penyusunan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2023 akan disesuaikan pada RKPD tersebut. Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2023 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 terutama pada tahun 2023.
- 2) Merancang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tahun 2023.
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023.
- 5) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 6) Tujuan tersusunnya Renja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Dokumen RENJA

Sistematika dokumen RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 terdiri dari 5 Bab yang masing-masing bab substansinya saling terkait dan mejadi satu kesatuan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RENJA

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah

3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator *outputnya*.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali selama tahun 2021 dan perkiraan capaian target tahun 2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2022. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 yang perlu dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.631.190.305,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 27.591.308.305,- dan Belanja modal sebesar Rp. 39.882.000,-. Pada tahun 2022 terdapat perubahan dalam APBD sehingga jumlah anggaran kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun mengalami perubahan. Perubahan anggaran tersebut melalui mekanisme perubahan APBD 2022, dengan total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 30.543.632.435,- dengan rincian Belanja operasi menjadi Rp. 30.503.750.435,- Serta Belanja modal menjadi Rp. 39.882.000,-. Perubahan tersebut dilakukan terkait adanya penambahan anggaran pada beberapa Sub Kegiatan dan juga adanya tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Penambahan jumlah anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, akan tetapi seperti dijelaskan pada Tabel 3.1 masih terdapat beberapa target kinerja yang masih belum tercapai seperti target kinerja pada tujuan strategis dengan indikator Indeks Demokrasi yang cenderung turun dari Tahun 2021 dan 2022. Serta pada indikator sasaran strategis dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022.

Perlu diketahui bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 mengalami perubahan karena terdapat perubahan konsep demokrasi yang digunakan. Konsep yang digunakan pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada tahun 2021 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan nasional, sementara Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 menghasilkan indeks tingkat provinsi, pusat, dan nasional. Realisasi nilai IDI Tahun 2021 dapat dilihat dari 3 aspek sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Nilai IDI Tahun 2021 Provinsi Bali

No	Variabel Indeks Demokrasi	Nilai
1	Aspek Kebebasan	84,62
2	Aspek Kesenjangan	77,25
3	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	63,92
IDI Komposit 2021		75,35

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2022

Target kinerja Indeks demokrasi yang tidak tercapai di tahun 2022 salah satunya diakibatkan oleh rendahnya nilai dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang hanya bernilai 63,92 poin. Akan tetapi aspek kebebasan sudah memberikan sumbangsih yang cukup baik yang bernilai 84,62 poin. Walaupun target kinerja tidak dapat tercapai, tapi kegiatan dalam meningkatkan Capaian Nilai IDI sudah dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga

dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik. Selain itu di Tahun 2022 sudah terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) IDI, dan juga pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan terus melakukan kegiatan untuk mendukung capaian nilai IDI dengan berfokus kepada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang sebelumnya memberikan capaian nilai terendah pada IDI Komposit Provinsi Bali Tahun 2021.

Capaian indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022. Walaupun di Tahun 2022 tidak terdapat data realisasi dari indikator tersebut, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di tahun 2022 tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung dari pencapain kinerja pada tahun 2022 untuk peningkatan pendidikan masyarakat sehingga nantinya menjelang Pemilu di Tahun 2024 dapat menjamin hak memilih dan dipilih dari masyarakat tersebut. Terjaminnya hak memilih dan dipilih masyarakat tersebut tentunya akan dapat meningkatkan persentase partisipasi politik masyarakat.

Tabel 2.2 Capaian IDI Provinsi Bali Menurut Indikator

Aspek	Indikator/ <i>Indicator</i>	2021
Kebebasan	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara <i>Guaranteed freedom of assembly, association, expression, and opinion by state officials</i>	93,95
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat <i>Guaranteed freedom of assembly, association, expression, and opinion among communities</i>	84,89
	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan / <i>Guaranteed freedom of belief</i>	89,92
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan <i>Guaranteed freedom of assembly, association, expression, opinion, and belief in every policy</i>	90,00

	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat <i>Guaranteed right to vote and be elected in elections</i>	99,24
	Pemenuhan hak-hak pekerja / <i>Fulfillment of workers' rights</i>	50,80
	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya <i>A free press in carrying out its duties and functions</i>	75,72
Kesetaraan	Kesetaraan gender / <i>Gender equality</i>	95,17
	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan <i>Community participation in influencing public policy through representative institutions</i>	36,36
	Anti monopoli sumber daya ekonomi / <i>Antimonopoly of economic resources</i>	69,33
	Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial <i>Access of the poor to social protection and security</i>	81,44
	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah / <i>Equality of job opportunities between regions</i>	94,63
	Akses masyarakat terhadap informasi publik / <i>Public access to public information</i>	83,29
	Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi / <i>Equality in basic services</i>	81,22
Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kinerja lembaga legislatif / <i>Performance of the legislative</i>	58,33
	Kinerja lembaga yudikatif / <i>Performance of the judiciary</i>	84,28
	Netralitas penyelenggara pemilu / <i>Neutrality election organizers</i>	70,00
	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah <i>Decisions of the State Administrative Court (PTUN) regarding government officials' policies</i>	85,00
	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat <i>Government guarantees the preservation of the environment and people's living spaces</i>	70,70
	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah <i>Budget transparency in the form of providing information on APBN/D by the government</i>	28,57
	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik / <i>Bureaucratic performance in public services</i>	66,80
	Pendidikan politik pada kader partai politik / <i>Political education for political party cadres</i>	45,71
Skor:		75,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Pada salah satunya dapat dilihat dari indikator aspek kebebasan dari IDI Provinsi Bali Tahun 2021. Hal tercermin dari nilai indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat yang sudah mendapatkan nilai yang dapat terbilang baik dalam capaiannya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerukunan berbangsa dan bernegara.

Selain permasalahan tersebut, yang menjadi permasalahan lainnya pada pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu :
 1. Masih kurangnya pemahaman ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengenai penerapan SAKIP yang baik, sehingga dapat mendukung tujuan organisasi.
 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas.
 3. Kurang optimalnya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas akibat keterbatasan anggaran yang ada.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi penerapan SAKIP yang baik ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
 2. Melakukan pengajuan kepada BKPSDM Provinsi Bali guna dapat mengisi pos jabatan yang kosong.
 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa.
 2. Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.
 3. Belum optimalnya dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, revolusi mental.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Melaksanakan bimbingan teknis berupa seminar wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparatur pemerintah yang dilakukan dalam rangkaian penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan serentak juga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
 2. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bulan Bung Karno untuk secara tidak langsung melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
 3. Melaksanakan Forum Pembauran Kebangsaan.
 4. Pelaksanan peringatan Hari Besar di Provinsi Bali.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah :
1. Kurangnya informasi perkembangan politik di daerah.
 2. Terbatasnya pendidikan politik di masyarakat.
 3. Turunnya capaian Indeks Demokrasi Provinsi Bali Tahun 2021.
- Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :
1. Dukungan anggaran untuk pemantauan dan perkembangan politik di daerah.
 2. Dukungan anggaran pendidikan politik masyarakat.
 3. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Provinsi Bali.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1. Meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat.
 2. Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali
 3. Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
- Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :
1. Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2. Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yaitu :
1. Urgensi peningkatan kewaspadaan daerah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
 2. Radikalisme & terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat di Provinsi Bali.
 3. Masih adanya potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
2. Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.
3. Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
4. Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.

Tabel 2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 (sampai dengan bulan Mei)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				7			8			9 = (8/7) x 100%	
1	2	3	4	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.543.632.435,00			27.571.610.867,00		90,27%
	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	10.955.760.267,00	83,23	nilai	10.022.173.792,00	100,28%	91,48%
	8.01.01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	9.330.380,00	83,23	nilai	8.287.580,00	100,28%	88,82%
	8.01.01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	6	dokumen	6.936.980,00	6	dokumen	5.991.680,00	100%	86,37%
	8.01.01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	2.393.400,00	2	dokumen	2.295.900,00	100%	95,93%
	8.01.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100	%	9.241.972.026,00	100	%	8.451.762.052,00	100,00	91,45%
	8.01.01. 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70	dokumen	9.241.972.026,00	70	dokumen	8.451.762.052,00	100%	91,45%
	8.01.01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tugas administrasi umum terselesaikan	100	%	256.932.645,00	100	%	192.003.335,00	100,00%	74,73%
	8.01.01. 1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	tahun	1.693.095,00	12	Bulan	1.693.095,00	100,00%	100,00%
	8.01.01. 1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100	%	41.213.750,00	67,51	%	26.045.750,00	67,51%	63,20%
	8.01.01. 1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1	tahun	80.000.000,00	12	Bulan	76.080.000,00	100,00%	95,10%
	8.01.01. 1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy	1	tahun	25.155.800,00	12	Bulan	21.601.300,00	100,00%	85,87%
	8.01.01. 1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	1	tahun	5.000.000,00	12	Bulan	3.360.000,00	100,00%	67,20%

8.01.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1	tahun	3.750.000,00	12	Bulan	2.002.000,00	100,00%	53,39%
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1	tahun	100.120.000,00	12	Bulan	61.221.190,00	100,00%	61,15%
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100	%	780.599.616,00	100	%	735.343.689,00	100,00%	94,20%
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	250	lembar	2.500.000,00	250	lembar	2.500.000,00	100%	100,00%
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon, listrik dan air PDAM	1	tahun	116.000.000,00	12	Bulan	80.579.977,00	100,00%	69,47%
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayar tepat waktu	1	tahun	662.099.616,00	12	Bulan	652.263.712,00	100,00%	98,51%
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100	%	666.925.600,00	100,00	%	634.777.136,00	100,00%	95,18%
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100	%	466.970.400,00	100	%	441.857.286,00	100,00%	94,62%
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100	%	180.025.200,00	100	%	173.337.600,00	100,00%	96,29%
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi	100	%	19.930.000,00	100	%	19.582.250,00	100,00%	98,26%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	90	%	612.919.596,00	90	%	399.968.746,00	100,00%	65,26%
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	612.919.596,00	76,96	%	399.968.746,00	76,96	65,26%
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Dokumen	612.919.596,00	2	Dokumen	399.968.746,00	200,00%	65,26%

	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	%	16.747.420.284,00	0	%	16.733.161.550,00	0%	99,91%
	8.01.03. 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	%	16.747.420.284,00	100	%	16.733.161.550,00	100%	99,91%
	8.01.03. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2	dokumen	16.747.420.284,00	3	dokumen	16.733.161.550,00	150%	99,91%
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16,60	%	1.942.878.744,00	16,6	%	149.290.712,00	100%	7,68%
	8.01.05. 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	1.942.878.744,00	85,57	%	149.290.712,00	85,57	7,68%
	8.01.05. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitas pencegahan	2	dokumen	1.942.878.744,00	2	dokumen	149.290.712,00	100%	7,68%

	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	284.653.544,00	88	%	267.016.067,00	100%	93,80%
	8.01.06. 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	284.653.544,00	88	%	267.016.067,00	100%	93,80%
	8.01.06. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	dokumen	284.653.544,00	3	dokumen	267.016.067,00	100%	93,80%

Tabel 2.4 Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN N	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	C	D	E	F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	6.936.980	5.991.680	0,02%	100,00	100,00	0	0,02	0,02	0	100,00	86,38	13,62	0,02	0,02	0	945.300
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	2.393.400	2.295.900	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	95,93	4,07	0,01	0,01	0	97.500
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	9.241.972.026	8.451.762.052	30,26%	100,00	100,00	0	30,26	30,26	0	100,00	91,45	8,55	30,26	27,67	2,59	790.209.974
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	1.693.095	1.693.095	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0	0

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	41.213.750	26.045.750	0,13%	100,00	67,51	32,49	0,13	0,09	0,04	100,00	63,20	36,80	0,13	0,09	0,05	15.168.000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	80.000.000	76.080.000	0,26%	100,00	100,00	0	0,26	0,26	0	100,00	95,10	4,90	0,26	0,25	0,01	3.920.000
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	25.155.800	21.601.300	0,08%	100,00	100,00	0	0,08	0,08	0	100,00	85,87	14,13	0,08	0,07	0,01	3.554.500
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	5.000.000	3.360.000	0,02%	100,00	100,00	0	0,02	0,02	0	100,00	67,20	32,80	0,02	0,01	0,01	1.640.000
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Fasilitasi Kunjungan Tamu (8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	3.750.000	2.002.000	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	53,39	46,61	0,01	0,01	0,01	1.748.000

10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	100.120.000	61.221.190	0,33%	100,00	100,00	0	0,33	0,33	0	100,00	61,15	38,85	0,33	0,20	0,13	38.898.810
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	2.500.000	2.500.000	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0	0
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	116.000.000	80.579.977	0,38%	100,00	100,00	0	0,38	0,38	0	100,00	69,47	30,53	0,38	0,26	0,12	35.420.023
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	662.099.616	652.263.712	2,17%	100,00	100,00	0	2,17	2,17	0	100,00	98,51	1,49	2,17	2,14	0,03	9.835.904
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	466.970.400	441.857.286	1,53%	100,00	100,00	0	1,53	1,53	0	100,00	94,62	5,38	1,53	1,45	0,08	25.113.114

15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	180.025.200	173.337.600	0,59%	100,00	100,00	0	0,59	0,59	0	100,00	96,28	3,72	0,59	0,57	0,02	6.687.600
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.0.00.0.00.01.01.)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	19.930.000	19.582.250	0,07%	100,00	100,00	0	0,07	0,07	0	100,00	98,25	1,75	0,07	0,06	0	347.750
17	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (8.01.0.00.0.00.01.02.)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	612.919.596	399.968.746	2,01%	100,00	76,96	23,04	2,01	1,54	0,46	100,00	65,26	34,74	2,01	1,31	0,7	212.950.850
18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (8.01.0.00.0.00.01.03.)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	16.747.420.284	16.733.161.550	54,83%	100,00	100,00	0	54,83	54,83	0	100,00	99,91	0,09	54,83	54,78	0,05	14.258.734

19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (8.01.0.00.0.00.01.05.)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	1.942.878.744	149.290.712	6,36%	100,00	85,57	14,43	6,36	5,44	0,92	100,00	7,68	92,32	6,36	0,49	5,87	1.793.588.032
20	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (8.01.0.00.0.00.01.06.)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PAD	284.653.544	267.016.067	0,93%	100,00	97,01	2,99	0,93	0,90	0,03	100,00	93,80	6,20	0,93	0,87	0,06	17.637.477
TOTAL			30.543.632.435	27.571.610.867	100,00%				100,00	98,55	1,45				100,00	90,27	9,73	2.972.021.568

Dari Tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa capaian fisik dari 41 kegiatan di tahun 2022 sebesar 98,55 berbanding capaian realisasi fisik tahun 2021 mencapai 99,95% sementara capaian keuangan tahun 2022 mencapai 90,27 berbanding capaian realisasi keuangan tahun 2021 mencapai 94,01%. Analisis capaian kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 dijelaskan pada sub bab berikut.

Evaluasi juga dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 untuk mendapatkan capaian kinerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sehingga didapatkan arah prioritas dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk Triwulan selanjutnya.

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 37.006.670.620,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.578.914.434,- (74,52%) dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2023(sampai dengan bulan Maret)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	7			8			9 = (8/7) x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5) x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				37.006.670.620,00			27.578.914.434,00		74,52%					KESBANGPOL	
	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	10.898.730.916,00	-	nilai	5.088.679.963,00	0,00%	46,69%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4	Dokumen	11.754.400,00	4	nilai	6.320.000,00	100,00%	53,77%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	2	dokumen	7.717.600,00	2	dokumen	4.760.000,00	100%	61,68%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	4.036.800,00	2	dokumen	1.560.000,00	100%	38,64%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70	dokumen	9.055.633.324,00	32	dokumen	4.236.581.394,00	45,71%	46,78%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang	9.055.633.324,00	49	Orang	4.236.581.394,00	100%	46,78%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	%	305.530.800,00	43,22	%	132.042.588,00	43,22%	43,22%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.120.000,00	6	Bulan	-	41%	0,00%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	112.494.200,00	6	Bulan	78.218.600,00	41%	69,53%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	75.000.000,00	6	Bulan	12.450.000,00	41%	16,60%					KESBANGPOL	

8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	18.142.600,00	6	Bulan	-	41%	0,00%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	5.000.000,00	0	Dokumen	-	0%	0,00%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	Laporan	89.774.000,00	4	Laporan	41.373.988,00	44%	46,09%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana gedung	3	Paket	80.945.000,00	0	Paket	51.000.000,00	0%	63,01%						
8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit	80.945.000,00	5	Unit	51.000.000,00	63%	63,01%						
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100	%	808.985.992,00	37,86	%	306.273.331,00	37,86%	37,86%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.200.000,00	1	Laporan	2.200.000,00	100%	100,00%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	110.000.000,00	0	Laporan	41.042.301,00	0%	37,31%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	696.785.992,00	0	Laporan	263.031.030,00	0%	37,75%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	%	635.881.400,00	56	%	356.462.650,00	56%	56,06%					KESBANGPOL	

8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	Unit	449.036.400,00	10	Unit	348.360.700,00	76,92%	77,58%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	17.040.000,00	0	Unit	-	0,00%	0,00%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	149.875.000,00	0	Unit	-	0,00%	0,00%						
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	19.930.000,00	0	Unit	8.101.950,00	0,00%	40,65%					KESBANGPOL	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	95	%	1.117.264.392,00	0	%	121.847.540,00	0,00%	10,91%					KESBANGPOL	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	1.117.264.392,00	19	%	121.847.540,00	19,00	10,91%					KESBANGPOL	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Dokumen	1.117.264.392,00	1	Dokumen	121.847.540,00	100,00%	10,91%					KESBANGPOL	

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	%	16.951.605.288,00	0	%	16.678.094.570,00	0%	98,39%					KESBANGPOL	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Progres Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	%	16.951.605.288,00	98,99	%	16.678.094.570,00	98,99%	98,39%					KESBANGPOL	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2	dokumen	16.951.605.288,00	2	dokumen	16.678.094.570,00	100%	98,39%					KESBANGPOL	

8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat	16,60	%	7.323.709.488,00	0	%	5.327.449.976,00	0%	72,74%					KESBANGPOL	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	7.323.709.488,00	97,9	%	5.327.449.976,00	97,90	72,74%					KESBANGPOL	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	dokumen	7.323.709.488,00	1	dokumen	5.327.449.976,00	100%	72,74%					KESBANGPOL	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	715.360.536,00	0	%	362.842.385,00	0%	50,72%					KESBANGPOL	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase progres Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	%	715.360.536,00	64,93	%	362.842.385,00	64,93%	50,72%					KESBANGPOL	

8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	dokumen	715.360.536,00	1	dokumen	362.842.385,00	50%	50,72%						KESBANGPOL	
-----------------	---	--	---	---------	----------------	---	---------	----------------	-----	--------	--	--	--	--	--	------------	--

Tabel 2.6 Realisasi Fisik Keuangan Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	C	D	E	F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (8.01.01.1.01.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.717.600	4.760.000	0,02%	100,00	100,00	0	64,87	0,02	0	100,00	61,68	38,32	64,87	0,01	0,01	2.957.600
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8.01.01.1.01.07) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana :	4.036.800	1.560.000	0,01%	100,00	100,00	0,00	64,87	0,01	0	100,00	38,64	61,36	64,87	0,00	0,01	2.476.800
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (8.01.01.1.02.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.055.633.324	4.236.581.394	24,47%	43,24	43,24	0,00	0,73	10,58	0	43,24	43,24	0,00	0,73	10,58	0,01	5.646.165.375
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (8.01.01.1.06.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.120.000	0	0,01%	100,00	0,00	100,00	64,87	0,00	0,01	100,00	0,00	100,00	64,87	0,00	0,01	5.120.000

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (8.01.01.1.06.02) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.494.200	78.218.600	0,30%	100,00	71,00	29,00	64,87	0,22	0,28	100,00	69,53	30,47	64,87	0,21	0,01	105.214.200
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (8.01.01.1.06.04) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000	12.450.000	0,20%	13,91	13,91	0,00	64,87	0,03	0	13,91	13,00	0,91	64,87	0,03	0,01	64.625.000
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (8.01.01.1.06.05) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.142.600	0	0,05%	94,49	0,00	94,49	64,87	0,00	0,05	94,49	0,00	94,49	64,87	0,00	0,01	18.142.600
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (8.01.01.1.06.06) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000	0	0,01%	33,60	0,00	33,60	64,87	0,00	0	33,60	0,00	33,60	64,87	0,00	0,01	5.000.000
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (8.01.01.1.06.09) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.774.000	41.373.988	0,24%	69,67	65,00	4,67	64,87	0,16	0,03	69,67	46,09	23,58	64,87	0,11	0,01	48.400.012

10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (8.01.01.1.07.10) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.945.000	51.000.000	0,22%	100,00	70,00	30,00	64,87	0,15	0,07	100,00	63,01	36,99	64,87	0,14	0,01	29.945.000
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat (8.01.01.1.08.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.200.000	2.200.000	0,01%	100,00	100,00	0,00	64,87	0,01	0	100,00	100,00	0,00	64,87	0,01	0,01	0
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (8.01.01.1.08.02) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000	41.042.301	0,30%	44,00	44,00	0,00	64,87	0,13	0	44,00	37,31	6,69	64,87	0,09	0,01	76.262.090
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (8.01.01.1.08.04) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	696.785.992	263.031.030	1,88%	32,08	30,00	2,08	64,87	0,56	0,14	32,08	30,00	2,08	64,87	0,46	0,01	525.333.776

14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan (8.01.01.1.09.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	449.036.400	348.360.700	1,21%	77,10	77,10	0,00	64,87	0,94	0	77,10	77,00	0,10	64,87	0,91	0,01	113.884.800
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.09.06) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.040.000	0	0,05%	50,00	0,00	50,00	64,87	0,00	0,02	50,00	0,00	50,00	64,87	0,00	0,01	17.040.000
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (8.01.01.1.09.09) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.875.000	0	0,40%	4,55	0,00	4,55	64,87	0,00	0,02	4,55	0,00	4,55	64,87	0,00	0,01	149.875.000

17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (8.01.01.1.09.10) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.930.000	8.101.950	0,05%	48,47	45,20	3,27	64,87	0,02	0,01	48,47	40,65	7,82	64,87	0,01	0,01	15.643.050
18	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (8.01.02)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan / Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan (8.01.02.1.01.03) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.117.264.392	121.847.540	3,02%	18,25	19,00	-0,75	64,87	0,57	0,02	18,25	10,91	7,34	64,87	0,23	0,01	1.024.488.668

19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (8.01.03)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik / Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (8.01.03.1.01.03) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.951.605.288	16.678.094.570	45,81%	98,88	98,99	-0,11	64,87	45,34	0,22	98,88	98,39	0,49	64,87	44,96	0,01	312.162.192
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (8.01.05)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya / Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (8.01.05.1.01.04) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.323.709.488	5.327.449.976	19,79%	96,78	97,90	-1,12	64,87	19,37	0,13	96,78	72,74	24,04	64,87	14,35	0,01	2.014.879.966

21	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (8.01.06)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial / Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (8.01.06.1.01.04) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	715.360.536	362.842.385	1,93%	42,33	64,93	-22,60	64,87	1,26	0,29	42,33	50,72	-8,39	64,87	0,61	0,01	490.737.904
TOTAL			37.006.670.620	27.578.914.434	100,00%				85,89	79,38	6,51				85,89	72,71	13,18	9.427.756.186

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar” mendukung pencapaian sasaran tersebut. Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2021		2022			Target Akhir Tahun Renstra 2023	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Capaian %		
	Tujuan Strategis								
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Angka Kriminalitas	3200	2602	2731	1793,00	152,31%	2262	126,16%
2	Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum dan Budaya Politik Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.	Indeks Demokrasi	81,00	77,59	81	75,35	93,02%	81	93,02%
	Sasaran Strategis								
1	Meningkatnya sistem keamanan masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	77%	77%	88%	88%	100%	100%	88,00%
2	Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78%	-	78%	-	-	78%	-
3	Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	-	-	90%	90%	100%	95%	94,74%
4	Meningkatnya Kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul	16,6%	16,6%	16,6%	16,60%	100	16,6%	100,00%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,00	82,92	83	83,23	100,28%	84	99,08%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan di tahun 2022 untuk masing – masing tujuan strategis dan sasaran strategis dengan indikator kinerja, realisasinya rata-rata sudah memberikan hasil kinerja yang baik dengan tercapainya target kinerja tersebut. Namun masih terdapat beberapa target kinerja yang masih belum tercapai seperti target kinerja pada tujuan strategis dengan indikator Indeks Demokrasi yang cenderung turun dari

Tahun 2021 dan 2022. Serta pada indikator sasaran strategis dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam renstra Tahun 2018 - 2023 dimana realisasi target yang ditetapkan di tahun 2022 untuk masing – masing tujuan strategis dan sasaran strategis dengan indikator kinerja, realisasinya rata-rata sudah memberikan hasil kinerja yang baik denga tercapainya target kinerja tersebut. Namun masih terdapat beberapa target kinerja yang masih belum tercapai sesuai dengan kondisi akhir periode Renstra Tahun 2018-2023 seperti target kinerja pada tujuan strategis dengan indikator Indeks Demokrasi yang cenderung turun dari Tahun 2021 dan 2022. Serta pada indikator sasaran strategis dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin di wujudkan, berikut dijabarkan capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali sebagai berikut :

- a. **Sasaran strategis 1 ;** Meningkatnya sistem keamanan masyarakat
- Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi, dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target dan Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	88%	88%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Pemenuhan target pada sasaran persentase sistem keamanan terintegrasi didukung oleh telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Adapun peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu

Berbasis Desa Adat adalah dengan menciptakan inovasi berupa Sistem Informasi Data Konflik (SIPELIK). SIPELIK ini pada tahun 2021 sudah berjalan dan sudah disosialisasikan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk dapat digunakan. Dalam pengoperasiannya SIPELIK ini mampu memberikan data mengenai potensi konflik yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sampai pada tingkat kecamatan. Sehingga dengan hadirnya SIPELIK ini pencapaian sasaran persentase sistem keamanan terintegrasi sudah dapat direalisasikan sesuai target di tahun 2022.

Pencapaian kinerja sebesar 100% dari target kinerja sistem keamanan terintegrasi salah satunya adalah dukungan dari capaian kegiatan dari Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan pelaksanaan kegiatan yang menitikberatkan kepada kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal untuk melakukan pengamanan di Provinsi Bali. Pengamanan di Provinsi Bali yang dilaksanakan sesuai dengan Tim Kerja yang dibentuk seperti : 1) Tim Kewaspadaan Dini di Daerah, 2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, 3) Tim Pemantauan Orang Asing dan 4) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Pembentukan Tim Kerja tersebut dilakukan bersama Instansi Vertikal yang terkait seperti : 1) Kodam IX Udayana, 2) Polda Bali, 3) Korem 163 Wira Satya, 4) Kejati Bali, 5) BINDA Bali, 6) Kanwil KumHam Bali, 7) Kanwil Kemenag Bali, 8) Lanal, 9) Lanud, 10) Bais TNI, 11) OPD Terkait.

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 284.653.544,00 bertujuan untuk meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial untuk menciptakan sistem keamanan terintegrasi. Indikator kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah Persentase sistem keamanan terintegrasi dengan target sebesar 88%. Realisasi capaian kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar 88% (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.016.067,00 (93,80%).

Kegiatan dalam program ini adalah :

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan bertujuan untuk merumuskan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase sistem keamanan terintegrasi dengan target sebesar 88% dengan anggaran sebesar Rp. 284.653.544,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.016.067,00 (93,80%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 284.653.544,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 267.016.067,00 (93,80%) dan realisasi kinerja 3 dokumen (100%).

b. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di Bidang Politik.

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.9
Target dan Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	78%	-	0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022, terkait pada tahun 2022 tidak terdapat

pemilihan umum yang diselenggarakan sehingga persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa diukur khusus untuk tahun 2022.

Akan tetapi sasaran kinerja tersebut dapat digambarkan secara umum dengan melihat nilai capaian dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bali. IDI merupakan indikator Komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 mengalami perubahan karena terdapat perubahan konsep demokrasi yang digunakan. Konsep yang digunakan pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada tahun 2021 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan nasional, sementara Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 menghasilkan indeks tingkat provinsi, pusat, dan nasional. Realisasi nilai IDI Tahun 2021 dapat dilihat dari 3 aspek dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Target kinerja Indeks demokrasi yang tidak tercapai di tahun 2022 salah satunya diakibatkan oleh rendahnya nilai dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang hanya bernilai 63,92 poin. Akan tetapi aspek kebebasan sudah memberikan sumbangsih yang cukup baik yang bernilai 84,62 poin. Walaupun target kinerja tidak dapat tercapai, tapi kegiatan dalam meningkatkan Capaian Nilai IDI sudah dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik. Selain itu di Tahun 2022 sudah terlaksananya *Focus Group Discussion* (FGD) IDI, dan juga pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.

Capaian indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022. Walaupun di Tahun 2022 tidak terdapat data realisasi dari indikator tersebut, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di tahun 2022 tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia,

dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung dari pencapaian kinerja pada tahun 2022 untuk peningkatan pendidikan masyarakat sehingga nantinya menjelang Pemilu di Tahun 2024 dapat menjamin hak memilih dan dipilih dari masyarakat tersebut. Terjaminnya hak memilih dan dipilih masyarakat tersebut tentunya akan dapat meningkatkan persentase partisipasi politik masyarakat.

Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan terus melakukan kegiatan untuk mendukung capaian nilai IDI dengan berfokus kepada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang sebelumnya memberikan capaian nilai terendah pada IDI Komposit Provinsi Bali Tahun 2021. Inovasi kedepannya dengan kegiatan untuk meningkatkan nilai IDI kembali seperti dengan lebih menggiatkan Tim Kerja IDI dalam melaksanakan FGD IDI untuk dapat lebih bersinergi dalam meningkatkan nilai IDI di tahun depan serta untuk mencapai sasaran Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di Bidang Politik khususnya untuk menyongsong Pemilu pada tahun 2024. Adapun Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 16.747.420.284,00 bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di bidang Politik. Indikator kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Adalah Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan target sebesar 78 %. Realisasi capaian kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 0% (N/A atau tidak terdapat data). Indikator kinerja ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022, terkait pada tahun 2022 tidak terdapat pemilihan umum yang diselenggarakan sehingga persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa diukur khusus untuk tahun 2022.

Pada program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik walaupun target kinerja tidak dapat tercapai, tapi kegiatan dalam meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di bidang Politik tetap dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang

maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik. Selain itu di Tahun 2022 sudah terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) IDI, dan juga pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Realisasi anggaran dari program ini sebesar Rp. 16.733.161.550,00 (99,91%).

Kegiatan dalam program ini adalah :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 16.747.420.284,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.733.161.550,00 (99,91%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan target 2 dokumen. Serta anggaran sebesar Rp. 16.747.420.284,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 16.733.161.550,00 (99,91%) dan realisasi kinerja 3 dokumen (150%).

c. Sasaran strategis 3; Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.10
Target dan Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISAS I	PERSENTAS E
1	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	90%	100%

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Nilai-nilai Kebangsaan dengan indikator Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan capaian 90%. Capaian sebesar 90% terseut didapatkan dari gambaran hasil pemahaman masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang paham akan Wawasan Kebangsaan. Pemahaman tersebut diukur melalui kuisisioner yang disebarkan kepada peserta sosialisasi, Masyarakat dikatakan paham akan wawasan kebangsaan ketika mereka dapat menjawab benar minimal 75% dari total pertanyaan yang disajikan. Hasil penyebaran kuisisioner tersebut memberikan hasil capaian dari Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebesar 90% tersebut.

Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Nilai-nilai Kebangsaan sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalankan beberapa kebijakan strategis yaitu Pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno, Peringatan hari lahir Pancasila, Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental, Pelaksanaan Hari Bela Negara. Pelaksanaan

kegiatan tersebut sangat kompleks dilaksanakan untuk dapat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dengan bentuk kegiatan yang berupa sosialisasi, bimtek dan forum tatap muka.

Dalam Kegiatan untuk menunjang sasaran ini terdapat satu program yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 612.919.596,00 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Indikator kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan adalah persentase meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan target sebesar 90%. Realisasi capaian kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan sebesar 90% (100%). Realisasi anggaran sebesar Rp. 399.968.746,00 (65,26%).

Kegiatan dalam program ini adalah :

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 612.919.596,00. Realisasi kinerja sebesar 76,96% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 399.968.746,00 (65,26%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah dengan target 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 612.919.596,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 399.968.746,00 (65,26%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (200%).

d. Sasaran strategis 4; Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.11
Target dan Kinerja Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISAS I	PERSENTAS E
1	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul	16,6%	16,6%	100%

Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Untuk mencapai sasaran strategis 4, Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalankan beberapa kebijakan strategis yaitu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Pencatatan keberadaan Ormas. Dengan terselenggaranya kegiatan di atas persentase Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dapat menurun 16,6% dalam skala 100%, sehingga pencapaian di tahun 2022 tercapai 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Pada salah satunya dapat dilihat dari indikator aspek kebebasan dari IDI Provinsi Bali Tahun 2021 yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. Hal tersebut tercermin dari nilai indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat yang sudah mendapatkan nilai yang dapat dibilang baik dalam capaiannya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerukunan berbangsa dan bernegara.

Dalam Kegiatan untuk menunjang sasaran ini terdapat satu program yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.942.878.744,00 bertujuan untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk menurunkan ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dengan target penurunan sebesar 16,6 %. Realisasi capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan penurunan ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebesar 16,6% (100%). Realisasi anggaran sebesar Rp. 149.290.712,00 (7,68%). Realisasi anggaran yang jauh dari target diakibatkan terdapat anggaran belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.760.013.600,00.

Kegiatan dalam program ini adalah :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.942.878.744,00. Realisasi kinerja sebesar 85,57% dan realisasi anggaran sebesar Rp.149.290.712,00 (7,68%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 1.942.878.744,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 149.290.712,00 (7,68%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).

e. **Sasaran strategis 5; Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali**

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.12
Target dan Kinerja Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83,23	100,28%

Sasaran Strategis 5, Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan *outcome* Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja yang didapatkan melalui **Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Bali, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021** memperoleh nilai sebesar **83,23** dengan kategori “**(A) – MEMUASKAN**”. Hasil penilaian atas masing-masing aspek dan komponen akuntabilitas kinerja secara rinci disajikan dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.13. Rincian Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,69
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,38
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,81
4.	Evaluasi Internal	10	7,48
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	15,88
TOTAL		100	83,23

Beberapa hal yang perlu diperbaiki dari implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP tersebut di atas adalah sebagai berikut :

➤ Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Renstra agar direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan dengan disertai dokumentasi hasil reviu;
- 2) Rencana Aksi atas kinerja menjabarkan target kinerja ke dalam target periodik dan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan serta dimonitor secara berkala.

➤ Pengukuran Kinerja

- 1) IKU agar direviu secara berkala disesuaikan dengan perkembangan.

➤ Pelaporan Kinerja

- 1) Menyempurnakan penyajian informasi kinerja LKjIP yang akan datang, antara lain menjelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra, serta melakukan perbandingan data kinerja secara memadai, baik secara internal maupun eksternal, untuk menggambarkan prestasi dan posisi kinerja unit/organisasi;

➤ Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- 1) Perencanaan Penetapan Target Capaian Kinerja agar diperhitungkan dengan baik sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai;
- 2) Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan Informasi mengenai capaian kinerja dapat diandalkan.

Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali perlu melakukan pembenahan terhadap poin-poin yang menjadi hasil evaluasi SAKIP tersebut, sehingga penerapan SAKIP kedepannya dapat lebih baik lagi. Kegiatan untuk menunjang sasaran ini terdapat satu program yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 10.955.760.267,00 bertujuan untuk meningkatnya nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) dalam menunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan target nilai sebesar 83. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan nilai 83,23 (100,28%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.022.173.792,00 (91,48%).

Kegiatan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen penyusunan, perencanaan dan evaluasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 8 dokumen, dengan anggaran sebesar Rp. 9.330.380,00. Realisasi kinerja sebesar 8 dokumen (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.287.580,00 (88,82%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 dokumen dan anggaran sebesar Rp 6.936.980,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.991.680,00 (86,37%) dan realisasi kinerja 4 dokumen (100%).
 - 2) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 2.393.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.295.900 (95,93%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 9.241.972.026,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.451.762.052,00 (91,45%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah 70 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 9.241.972.026,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.451.762.052,00 (91,45%) dan realisasi kinerja 70 dokumen (100%).
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya

pelayanan administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tugas administrasi umum terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 256.932.645,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.003.335,00 (74,73%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 1.693.095,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.693.095,00 (100%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dengan target 100% terpenuhi dan anggaran sebesar Rp 41.213.750,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 26.045.750,00 (63,20%) dan realisasi kinerja 67,51%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja persentase terpenuhinya bahan logistik kantor selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 76.080.000,00 (95,10%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja tersedianya barang cetak dan biaya foto copy selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 25.155.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 21.601.300,00 (85,87%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.360.000,00 (67,20%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja jumlah fasilitas kunjungan tamu selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 3.750.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.002.000,00 (53,39%) dan realisasi kinerja 100%.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah rapat koordinasi dan konsultasi selama 1

tahun dan anggaran sebesar Rp. 100.120.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 61.221.190,00 (61,15%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 780.599.616,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 735.343.689,00 (94,20%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja Jumlah jumlah materai yang tersedia sejumlah 250 lembar materai dan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 250 lembar materai (100%).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja terbayarnya langganan telepon, listrik dan air PDAM selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 116.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.579.977,00 (69,47%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 662.099.616,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 652.263.712,00 (98,51%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah terpenuhi dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 666.925.600,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 634.777.136,00 (95,18%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja persentase terpeliharanya kendaraan dinas dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp. 466.970.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 441.857.286,00 (94,62%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja persentase terpeliharanya peralatan dan mesin Lainnya dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp. 180.025.200,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 173.337.600,00 (96,29%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja persentase terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp. 19.930.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 19.582.250,00 (98,26%) dan realisasi kinerja 100%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta

melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. dihadapkan kepada beberapa tantangan dan peluang, dimana tantangan dan peluang itu tetap ada dari tahun ke tahun sehingga tetap membutuhkan strategi dan kebijakan untuk meminimalkannya.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang memadai dan handal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.
5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal yaitu :

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Beberapa alasan Bali menjadi Target Serangan Teroris adalah :

- a. Bali merupakan daerah tujuan pariwisata yang terkenal di dunia.
 - b. Banyaknya wisatawan orang asing yaitu dari Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Italia dan lainnya yang berada di Bali.
 - c. Apabila serangan teroris terjadi di Bali, hal ini dengan cepat berdampak global karena dengan mudah di akses melalui media internasional
 - d. Sehubungan dengan ketiga hal tersebut di atas memenuhi salah satu karakter terorisme yaitu *PUBLIKASI* dengan cepat ke seluruh dunia.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak lingkungan, sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2023, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai berikut :

“EWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA”

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan
- Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan
- Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Prioritas 5 : Pariwisata
- Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

PRIORITAS 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Bidang Pangan, Sandang dan Papan sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.

2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sangat penting dilakukan mengingat perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam upaya, (1) penyediaan bantuan rumah layak huni, (2) pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM, (3) pembangunan instalasi pengolahan sampah, (4) pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) mengolah hasil pertanian pasca panen, (2) memastikan nilai jual harga hasil pertanian menguntungkan bagi petani.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pendampingan industri tenun, (2) mendorong pemberdayaan koperasi tenun, (3) fasilitasi pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun, (4) pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan.
7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar.

PRIORITAS 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Pada prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan fasilitas pelayanan dasar, melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya, (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) penanganan stunting.
3. Jaminan kesehatan krama Bali sejahtera, dilakukan melalui kegiatan (1) penguatan jaminan kesehatan krama Bali.
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah, (3) penetapan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan SPM.

PRIORITAS 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh 5 (lima) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program revitasilasi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi atau pemberdayaan dilakukan sesuai dengan potensi kearifan lokal masyarakat. Pelatihan pariwisata, pertukangan, perbengkelan, industri kerajinan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
2. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam bentuk bedah rumah bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni serta akses lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
3. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas, melalui (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
4. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
5. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) pembekalan akhir

pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI ke luar negeri, (3) penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui bursa kerja online (BKOL), (4) pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), (5) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (6) pembinaan penggunaan tenaga kerja asing, (7) pengelolaan informasi pasar kerja, (8) penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja atau siswa, (9) perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK), (10) penerapan dan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistem kelompok, (11) pembinaan tenaga kerja mandiri.

PRIORITAS 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan krama Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu :

1. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui, (1) pembinaan desa adat, (2) pendidikan dan pelatihan desa adat.
2. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan (1) pembinaan subak dan subak abian, (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
3. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
4. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman.
5. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui kegiatan (1) Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) peragaan dan pementasan seni budaya, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran seni rupa, (8) standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa).
6. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita.

PRIORITAS 5 : Pariwisata

Prioritas 5, Pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan filosofi tri hita karana dalam menjaga keharmonisan alam

semesta, manusia dan kebudayaan sebagai genuine Bali. Pada program prioritas pariwisata terdapat 5 (lima) dimensi yaitu :

1. Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu (1) Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya, (2) Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dan (3) Pengembangan kawasan wisata berbasis buatan.
2. Peningkatan pemasaran pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) analisa pasar dan indeks kepuasan masyarakat, (2) penyusunan data MICT dan statistik kepariwisataan.
3. Pengembangan standar industri pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) pengawasan usaha jasa pariwisata, (2) pengawasan usaha sarana pariwisata, (3) penyusunan perda tentang kontribusi pariwisata (*passanger fee*).
4. Pengembangan SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, (2) peningkatan peran serta kelembagaan kepariwisataan.
5. Pengembangan produk pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW buatan, (2) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW alam, (3) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW budaya.

PRIORITAS 6 : Penguatan Infrastruktur

Pada Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas. Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industri yang akan mendukung konektifitas antar daerah. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistik daerah, (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.

3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, (3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, (2) pengendalian atau pengamanan pantai.

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui, pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, (3) perumusan kebijakan daerah.
4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan, (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan pemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya, (1) untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan public, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Berdasarkan arah kebijakan Provinsi Bali Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang

kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam pencapaian arah kebijakan Provinsi Bali Tahun 2023 adalah membantu mewujudkan Prioritas Daerah ke 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan melaksanakan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan administrasi badan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Penelahaan Usulan Masyarakat

Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 tidak bisa terlepas dari masukan-masukan dari masyarakat. Pada Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 masukan masyarakat telah diserap melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022. Beberapa masukan-masukan yang telah diterima dari beberapa pihak yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Masukan dari Ketua KPU Provinsi Bali (I Dewa Agung Gede Lidartawan) menyampaikan bahwa hingga saat ini mesyarakat belum seluruhnya mengetahui kapan pelaksanaan Pemilu 2024, padahal pentahapan Pemilu telah dimulai pada Tahun 2022, oleh karena itu, beberapa atensi dari KPU Provinsi Bali, sebagai berikut:
 - (1) 40 persen penyelenggara di KPU sudah tidak dapat mendaftarkan diri kembali, oleh karena itu rencana pada Bulan November 2022 akan dilaksanakan perekrutan penyelenggara termasuk di dalamnya tenaga kesehatan. Merujuk pada kasus *Covid-19*, masyarakat usia diatas 50 tahun sudah tidak dapat mendaftarkan diri.
 - (2) Anggaran total yang direncanakan oleh KPU Provinsi Bali dalam Pemilu 2024 sebesar Rp 275.360.333.960,- dengan 46,9 persennya dialokasikan untuk pembayaran Tim Adhoc sebanyak Rp 129.353.450.000,-. Anggaran tersebut dibuat maksimal disebabkan pihaknya baru akan mengetahui jumlah calon peserta pemilu pada Februari/Maret 2024 sementara anggaran harus telah ditentukan pada Tahun 2023. Oleh

karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali perlu menyediakan anggaran untuk KPU Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, TNI dan Polri agar anggaran dapat ditandatangani pada Tahun 2023.

- (3) Adanya janji Gubernur Bali untuk memberi dana apresiasi kepada desa dengan partisipasi tertinggi pada tiap Kabupaten/Kota diharapkan dapat segera terealisasi karena dikhawatirkan akan menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu oleh KPU Provinsi Bali kedepannya.
 - (4) Perlu diberikan dana monitoring bagi KPU Provinsi Bali untuk melaksanakan pengecekan di lapangan secara langsung dan berkala dalam rangka menghindari adanya kekeliruan maupun potensi penyelewengan di lapangan.
 - (5) Diharapkan dana hibah untuk renovasi kantor KPU Provinsi Bali dapat disegerakan mengingat kondisi kantor sudah memprihatinkan berpotensi menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas jelang Pemilu 2024.
- 2) Masukan dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali (Ketut Ariyani) menyampaikan bahwa total anggaran yang dibutuhkan Bawaslu Provinsi Bali dalam Pemilu 2024 sebanyak Rp 125.864.309.000,- untuk mendukung program diantaranya desa sadar hukum; sosialisasi pengawasan partisipasi; sosialisasi penanganan pelanggaran; dan peningkatan kapasitas pengawas pemilu di kabupaten/kota. Selain itu, sinergitas dengan *stakeholder* perlu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan. Sementara pihaknya turut mengharapkan adanya pemberian hibah maupun pinjaman lokasi kantor untuk menekan anggaran penyewaan kantor khususnya di tingkat kecamatan.
- 3) Masukan dari Kepala Bagian Operasional Binda Bali (Kombes Pol Benny Pramono) menyampaikan bahwa seluruh *stakeholder* yang ada perlu melaksanakan sinergitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 termasuk hal-hal terkait potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi, diantaranya:
- (1) Kerawanan dari sektor ideologi, politik, sosial, dan pertahanan-keamanan:
 - a. Polarisasi akibat persebaran misinformasi melalui media sosial, hasil pantauan telah terdapat persebaran dan pengelompokan yang disebabkan oleh misinformasi. Terkait hal ini, pihaknya telah melaksanakan *counter* opini maupun kontra narasi untuk meminimalisir dampak misinformasi di tengah masyarakat.

- b. Maraknya politik identitas dengan penggunaan isu SARA, hampir sama seperti penggunaan isu tersebut pada Pemilu 2019, diperkirakan pada Pemilu 2024 hal tersebut masih akan digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
 - c. Penyebaran kampanye jahat melalui media digital secara berkelanjutan, dapat berdampak pada menurunnya elektabilitas pejabat negara maupun calon pejabat negara dalam Pemilu 2024 serta dikhawatirkan memicu konflik antar pendukung.
 - d. Keberadaan kelompok radikal, teror dan organisasi terlarang secara tertutup. Pergerakan kelompok tersebut di Provinsi Bali masih terdeteksi, sehingga pemantauan akan terus dilaksanakan guna deteksi dini dan cegah dini adanya rencana kegiatan yang berpotensi mengganggu kamtibmas.
 - e. Konflik internal parpol peserta pemilu, saat ini terdapat pergerakan yang mengindikasikan kemungkinan tersebut sehingga seluruh *stakeholder* perlu bekerjasama untuk tetap menjaga masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi kejadian internal partai.
- (2) Kerawanan dari pihak penyelenggara yang terdiri dari aspek Pengadaan, distribusi, dan pengelolaan logistik dan Profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.
- (3) Kontemplasi dan partisipasi pemilih yang berpotensi mengalami penurunan di tengah pandemi *Covid-19*.
- 4) Masukan dari Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Bali, Bidang Politik dan Pemerintahan (Dr.Drs.AA Gede Oka Wisnumurti, M.Si) menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi harus dilaksanakan secara pro aktif baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali maupun oleh *stakeholder* lainnya untuk dapat mewujudkan target yang sama. Dalam hal ini, rencana pendanaan patutnya ditentukan sejak awal dengan nominal yang paten atas perhitungan yang matang. Dalam realisasi programnya, setiap elemen yang terlibat perlu turut memanfaatkan pendanaan masing-masing yang bersifat paralel untuk mendukung target tersebut yang dalam hal ini merupakan Pemilu 2024. Oleh karena itu, diharapkan koordinasi terus dilaksanakan hingga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara utama.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali disusun dengan berpedoman pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Prioritas Nasional yang mendukung program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema sebagai berikut :

Tema Pembangunan :

“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”

Sasaran Fokus RKP Tahun 2023 :

- 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
- 2) Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan,
- 3) Penanggulangan Pengangguran Disertai Peningkatan *Decent Job*,
- 4) Mendorong Pemulihan Dunia Usaha,
- 5) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan,
- 6) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim),
- 7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara,
- 8) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antara Lain: Air Bersih dan Sanitasi.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam

pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2023 adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kedepan. Yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali dan RENSTRA OPD melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Bali saat ini serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Bali, dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, kearifan lokal yang ada di masyarakat, serta mengantisipasi tantangan dan peluang, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan Visi yang akan dicapai yaitu **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana"**, yang mengandung makna "Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, Sekala Niskala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945".

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **"Misi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023"** yang berjumlah 22 misi. Dari 22 misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memedomani Misi ke 19 **"Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan"** dan Misi ke 20 **"Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali"**. Berdasarkan misi di atas tujuan jangka menengah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah “**Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis**”.

Sebagai perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki peranan dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Selain situasi dan kondisi umum, di daerah Bali juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor yang berpotensi menghambat yang sudah dijelaskan dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sekalipun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya yang sudah dijelaskan dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, selanjutnya diangkat beberapa isu-isu strategis antara lain:

- 1) Radikalisme dan terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bali,
- 2) Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan dimasa Covid-19 dan kecenderungan opini negatif di media sosial serta terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda,
- 3) Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus dasar nasional,
- 4) Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang *multi culture* secara Nasional yang akhirnya berimbas ke daerah.

3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi. Untuk mendukung terwujudnya Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keamanan Masyarakat

Sasaran strategis 1 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran “Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi”

2. Meningkatnya Kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran strategis 2 tersebut di atas yang semula diukur dengan indikator sasaran “Nilai Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Berpendapat dan Berkeyakinan”

3. Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik

Sasaran strategis 3 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu”

4. Meningkatnya Nilai-Nilai Kebangsaan

Sasaran Strategis 4 tersebut diatas diukur dengan indikator sasaran “Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila”

5. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Sasaran Strategis 5 tersebut diatas merupakan sasaran pendukung diukur dengan indicatorsasaran “Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja”.

Tabel 3.1
Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	1) Meningkatnya keamanan masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	88	100
		2) Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Nilai Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Berpendapat dan Berkeyakinan	16,6	16,6
		3) Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78	78
		4) Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap	90%	95%

			Aktualisasi Nilai- Nilai Pancasila		
INDIKATOR PENDUKUNG :					
		5) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk dapat meningkatkan capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai Indikator Kinerja, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengusulkan 5 program beserta kegiatannya melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan dan sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 telah dilakukan Pemetaan/*Mapping* terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 untuk Klasifikasi dan kodefikasi Kesatuan Bangsa Dan Politik masuk dalam urusan pemerintahan umum dengan kode 8.01. dan untuk Pemetaan/*Mapping* Program dan Kegiatan sampai sub kegiatan yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tertuang pada Tabel terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 yang berpedoman dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, maka dapat dijadikan acuan bagi seluruh Unit Kerja/Bidang yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan 1 (satu) tahun ke depan. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Dalam Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 memuat rencana kebijakan serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang merupakan penjabaran tahunan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di tahun 2023;
- 2) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dan dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
- 3) Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Pemerintah Provinsi Bali, keberadaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali diintegrasikan dengan rancangan Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali (RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali).